

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah, dimana tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat diserahkan kepada pemerintah daerah. Tugas dan wewenang tersebut di laksanakan pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada perundang undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 1 memberikan definisi tentang otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar pemerintah daerah memperoleh dana perimbangan, tetapi juga hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana pengelolaan sistem keuangan daerah yang mampu dapat memberikan pengelolaan keuangan yang lebih adil, rasional, transparasi, dan lebih bertanggungjawab. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan memberikan sumbangan yang besar dalam mewujudkan good governance.

Kabupaten Kupang yang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang juga ikut melaksanakan otonomi daerah

dengan mengelola secara mandiri dan memanfaatkan sejumlah sumber daya yang dimilikinya. Kinerja dari sebuah pemerintahan menunjukkan bagaimana pelaksanaan dari otonomi daerah tersebut berjalan, sehingga hal tersebut sangat penting untuk dilihat dan diukur. Karena keberhasilan dari suatu pemerintahan dapat dilihat dengan berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Kinerja itu sendiri merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi pemerintah.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif.

Tetapi hingga saat ini otonomi daerah memang sudah berjalan di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Namun realitanya menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat didalam mengatur rumah tangga daerah. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antar pusat dan daerah.

Menurut (Khusaini, 2018) tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat daerah.

Singkatnya, dapat disebutkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Beberapa permasalahan kinerja keuangan daerah yang dihadapi Daerah Kabupaten Kupang, antara lain yaitu : 1) Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonomi maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, 2) Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer, 3) Kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. Realisasi anggaran Kabupaten Kupang Tahun 2018-2021 ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1 Data Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Kupang
Tahun 2018-2021

TAHUN	PENDAPATAN DAERAH	TOTAL PAD	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	DANA PERIMBANGAN
2018	Rp1.236.846.999.491	Rp66.182.995.394	Rp1.120.809.514.097	Rp961.319.841.490
2019	Rp1.266.901.145.258	Rp62.047.535.548	Rp979.722.782.414	Rp949.294.954.609
2020	Rp1.175.919.425.857	Rp65.952.353.499	Rp1.045.542.422.423	Rp852.263.771.208
2021	Rp1.161.477.530.683	Rp74.342.549.538	Rp1.026.609.587.291	Rp1.028.609.587.291

Sumber : BPKAD Kabupaten Kupang, 2023

Berdasar pada tabel 1.1. diatas, diketahui bahwa realisasi anggaran Kabupaten Kupang pada tahun 2018-2019 secara umum cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2020 mengalami penurunan anggaran, pada tahun 2021 pendapatan daerah mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan daerah Kabupaten Kupang didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif masih sangat kecil terhadap seluruh total pendapatan.

Tabel 1. 2 Data Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Kupang
Tahun 2018-2021

Tahun	Belanja	Belanja operasi	Belanja modal
2018	Rp1.221.688.581.122	Rp1.003.029.064.991	Rp218.108.209.235
2019	Rp1.211.863.528.921	Rp1.049.185.008.815	Rp160.217.090.741
2020	Rp1.149.687.557.091	Rp1.016.172.823.897	Rp120.630.115.451
2021	Rp1.185.890.563.525	Rp792.470.015.219	Rp153.328.335.409

Sumber : BPKAD Kabupaten Kupang, 2023

Berdasar pada tabel 1.2. diatas, diketahui bahwa jika dilihat dari aspek belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi dan belanja, belanja operasi memiliki porsi pengeluaran yang lebih tinggi jika dibanding dengan belanja modal, belanja operasi tahun 2018-2020 tersebut cenderung mengalami peningkatan, namun pada tahun 2021 belanja operasi menurun dari tahun sebelumnya, sedangkan dilihat belanja modal dari tahun 2018-2020 secara umum cenderung mengalami penurunan dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan.

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian ini. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Saputra, Suwendra dan Yudiaatmaja (2018), dengan Judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana” dari hasil analisis menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) varian pendapatan termasuk dalam kategori baik (2) rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang (3) rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali (4) rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif (5) varian belanja termasuk dalam kategori baik (6) rasio keserasian belanja menunjukkan realisasi belanja lebih banyak pada belanja operasional (7) rasio efisiensi belanja termasuk dalam kategori efisien.

Penelitian lain juga diteliti oleh Rawis, Manossoh dan Pusung (2020), dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2018” dari hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2016-2018 dilihat dari derajat desentralisasi menunjukkan rata-rata <10% dimana pemerintah belum mampu dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio efektivitas PAD menunjukkan cukup efektif dan mampu dalam memobilisasikan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan yang di targetkan. Dan pertumbuhan belanja daerah mengalami pertumbuhan secara positif dan jumlah kenaikan yang didapat masih terbilang wajar, belanja operasi terhadap

total belanja masuk dalam kategori kurang serasi, belanja modal terhadap belanja masuk dalam kategori tidak serasi dan efisiensi belanja daerah menunjukkan rasio efisiensi kurang dari 100% yang artinya pemerintah sudah melakukan penghematan anggaran belanja anggaran belanjanya maka dikategorikan efisien.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan APBD di Kabupaten Kupang dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kupang Tahun 2018-2021.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “Kinerja Keuangan Pemerintah daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang”.

1.3. Persoalan Penelitian

1. Bagaimana Kinerja Keuangan daerah dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kupang jika diukur menggunakan Rasio Pertumbuhan Tahun 2018-2021?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan daerah dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kupang jika diukur menggunakan Rasio Ketergantungan keuangan daerah Tahun 2018-2021?

3. Bagaimana Kinerja Keuangan daerah dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kupang jika diukur menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2018-2021?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan daerah dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kupang jika diukur menggunakan Rasio Efektivitas PAD Tahun 2018-2021?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan daerah dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kupang jika diukur menggunakan Rasio Keserasian Tahun 2018-2021?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

- 1). Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kupang jika diukur menggunakan Rasio Pertumbuhan tahun 2018-2021.
- 2). Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kupang jika diukur menggunakan Rasio Ketergantungan keuangan daerah tahun 2018-2021.
- 3). Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kupang jika diukur menggunakan Rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2018-2021.
- 4). Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kupang jika diukur menggunakan Rasio Efektivitas PAD tahun 2018-2021.

- 5). Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kupang jika diukur menggunakan Rasio Keserasian tahun 2018-2021.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri atas :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan untuk melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- 1). Bagi peneliti

Sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Manajemen selain itu peneliti juga punya keinginan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya pemerintah daerah kabupaten kupang.

- 2). Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Kupang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan daerah dalam pengelolaan APBD Kabupaten Kupang sehingga dalam melaksanakan program atau kegiatan dapat berjalan dengan ekonomis, efisiensi dan efektivitas.